



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari No.52 Kel.Oebobo Kec.Oebobo  
Telepon: (0380) 821804 Faks: (0380) 822218

Kupang, 10 Maret 2025

Nomor : Setwan1.010/122/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1(Satu) Jepitan  
Hal : Pengajuan PIC PPID

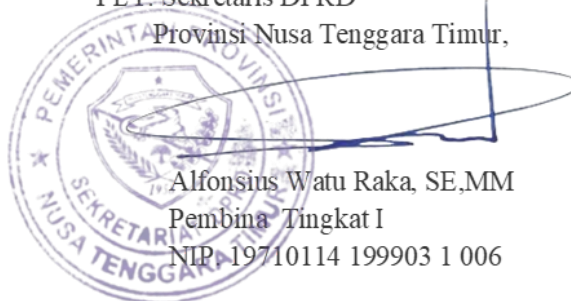
Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur  
di-  
Tempat

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sehubungan dengan operasional website Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajukan 2(dua) orang sebagai Person In Charge (PIC) pengelola website guna mendukung PPID Utama di dalam menyediakan dan melayani publikasi pada [www.ppidutama.nttprov.go.id](http://www.ppidutama.nttprov.go.id) sebagai berikut :

1. Nama : Polykarpus D. Mauko, S.Kom  
NIP : 197907242009011007  
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I  
Jabatan : Penata Kelola Sistem Informasi  
No. HP : 08123625343
2. Nama : Try Desmiany Mbeo, S.Kom  
NIP : 199612242022022001  
Pangkat/Golongan : Penata Muda/ IIIa  
Jabatan : Pranata Komputer – Ahli Pertama  
No. HP : 082145676564

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

PLT. Sekretaris DPRD  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Alfonsius Watu Raka, SE,MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710114 199903 1 006

Paraf Hierarki	
Kepala Bagian Umum	
Kepala Sub Bagian TU, Kepegawaian Dan Keanggotaan Dewan	
Ahli Pertama – Pranata Komputer	

Lampiran I

Nomor : Setwan1.010/119/2025

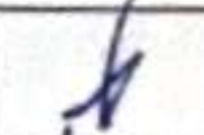
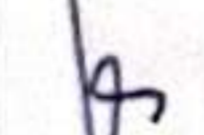

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTT**  
**TAHUN 2025**

No	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Retensi Arsip
1	Struktur Organisasi	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2024	Cetak dan Digital	Permanen
2	Tugas Pokok dan Fungsi	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2023	Cetak dan Digital	Permanen
3	Profil Kantor	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2023	Cetak dan Digital	Permanen
4	Profil Pimpinan PD	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2023	Cetak dan Digital	Permanen
5	Rencana Strategis (Renstra)	Bagian Keuangan	Kupang, 2024	Cetak dan Digital	5 Tahun
6	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025	Bagian Keuangan	Kupang, 2024-2025	Cetak dan Digital	Tahunan
7	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2023 – 2024	Cetak dan Digital	Tahunan
8	LAKIP 2024	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2025	Cetak dan Digital	Tahunan

9	Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 2024	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2025	Cetak dan Digital	Tahunan
10	Daftar Informasi Publik (DIP)	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2025	Cetak dan Digital	Tahunan
11	SK PPID Pembantu	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2025	Cetak dan Digital	Permanen
12	Rekapan Daftar PNS dan Non PNS	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2025	Cetak dan Digital	Permanen
13	Rekapan Anggota DPRD Provinsi NTT	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2024 – 2029	Cetak dan Digital	5 Tahun
14	Regulasi Pelaksanaan Tugas	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2023	Cetak dan Digital	Permanen
15	Dokumen Laporan Tahunan	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2024 – 2025	Cetak dan Digital	Tahunan

16	Dokumen Kinerja Tahun Berjalan	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2024 – 2025	Cetak dan Digital	Tahunan
17	Jumlah Perda yang dihasilkan DPRD Provinsi NTT	Bagian Persidangan	Kupang, 2023 – 2024	Cetak dan Digital	Tahunan


 PLT Sekretaris DPRD  
 Provinsi Nusa Tenggara Timur,  
 Alfonsius Watu Raka, SE,MM  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19710114 199903 1 006

Paraf Hierarki	
Kepala Bagian Umum	
Kepala Sub Bagian TU, Kepegawaian Dan Keanggotaan Dewan	
Ahli Pertama – Pranata Komputer	

Lampiran II

Nomor : Setwan1.010/119/2025

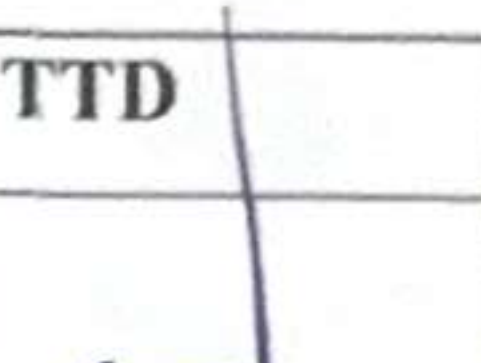

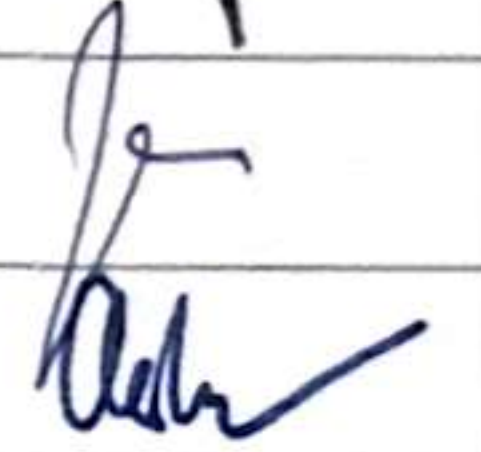

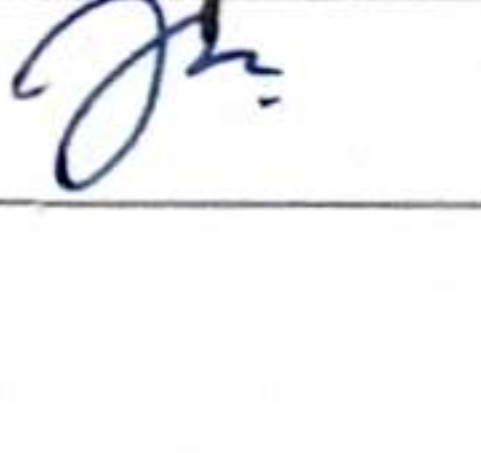



**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
SEKETARIAT DPRD PROVINSI NTT TAHUN 2025**



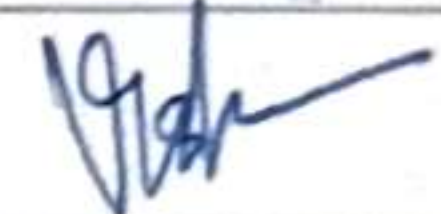
Pada hari ini, Senin tanggal 17 bulan Februari tahun 2025 bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi NTT telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU
			AKIBAT BILA DIBUKA	JIKA DITUTUP	
1.	<b>Data pribadi penduduk (No KK, NIK) DPRD dan PNS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) Pasal 17 huruf i</li><li>• UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84 ayat(1) dan (2), Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diketuainya rahasia pribadi seseorang</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terlindunginya rahasia pribadi seseorang</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sampai terbitnya keputusan Mendagri /Gubernur/ Bupati /Walikota tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk</li></ul>
2.	<b>Dokumen penyelesaian sengketa</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• UU no.14 Tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) Pasal 17 huruf a</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terhambatnya proses penegakan hukum</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terbantunya proses penengakan hukum</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa)</li></ul>

3.	<b>Laporan Keuangan (laporan keuangan yang belum diaudit)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 ayat (1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terhambatnya kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbantunya keberhasilan pelaksana pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit</li> </ul>
4.	<b>Hasil Rapat dari jenis-jenis rapat DPRD Provinsi NTT yang dinyatakan tertutup dalam tata tertib DPRD Provinsi NTT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, h dan i</li> <li>• UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf i</li> <li>• UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</li> <li>• Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat RI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berpotensi menyebabkan kebocoran informasi yang bersifat rahasia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjaga dan menjamin kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia sehingga menciptakan situasi yang kondusif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 Tahun atau sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum</li> </ul>

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

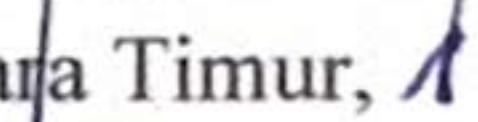
No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Alfonsius Watu Raka, SE, MM	Plt. Sekretaris DPRD	Sekretariat DPRD	
2	Drs. Agustinus Haki Bano, M.Si	Kepala Bagian Umum	Bagian Umum	
3	Nurce Sombu, SH	Kepala Bagian Persidangan, Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Bagian Persidangan, Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	
4	Dra. Jenny T. Mamele, MH	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	
5	Yuliasty K. Mawuntu, SH.,MM	Penelaah Teknis Kebijakan	Bagian Persidangan, Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	
6	Mesak Dominggus Lazarus, SE, M.Ec.Dev	Perencana – Ahli Muda	Bagian Keuangan	
7	Jorgie Herald Dami, S.Ip, MM	Penelaah Teknis Kebijakan	Bagian Persidangan, Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	
8	Polykarpus Mauko, S.Kom	Penata Kelola Informasi	Bagian Persidangan, Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	

9	Try Desmiarny Mbeo, S.Kom	Pranata Komputer – Ahli Pertama	Bagian Umum	
10	Dewi Paramitha Tiara, S.STP	Penelaah Teknis Kebijakan	Bagian Persidangan, Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	
11	Vista G. Ello, SH	Penelaah Teknis Kebijakan	Bagian Persidangan, Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

PLT. Sekretaris DPRD

Provinsi Nusa Tenggara Timur, 



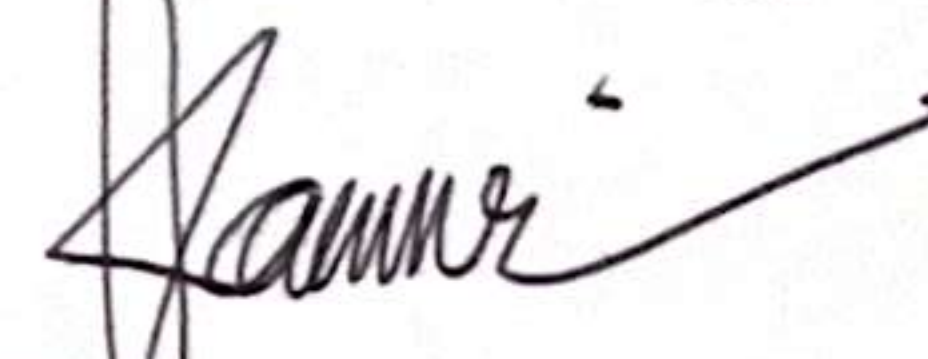
Alfonsius Watu Raka, SE,MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19710114 199903 1 006

Ketua Komisi Informasi

Provinsi Nusa Tenggara Timur,

  
Daniel Tonu, M.Si